PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULTAN HAM YAHYA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI**
3. NHK : **916121**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 473 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 417 m2/97 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 198.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA V Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, DAIHATSU AYLA 1.0 M AT. Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO REVO 110 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 10.600.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	565.565.346
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.184.165.346
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.184.165.346

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.